

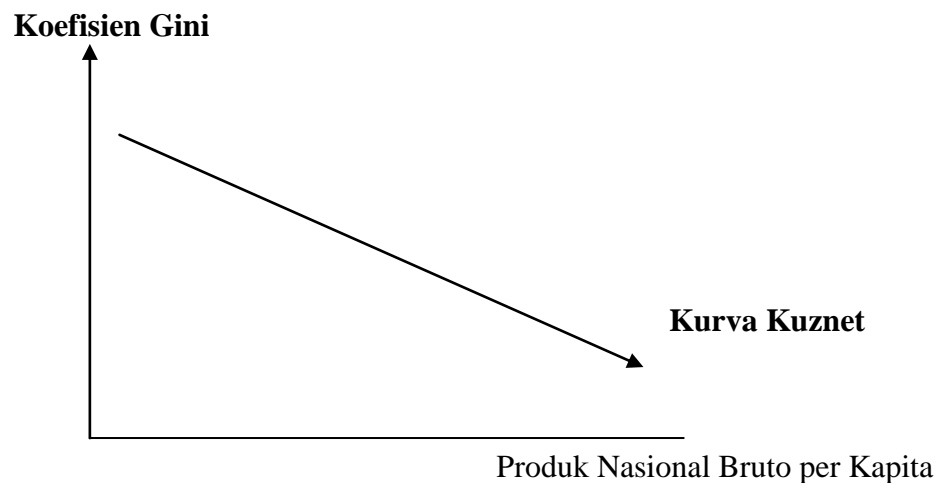
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan meningkat. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perubahan sektor modern.



Sumber: Todaro, 2003

Gambar 2.1 Kurva Kuznet “U-Terbalik”

Menurut Todaro (2003), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan disuatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerimaan pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut.

Keadaan ini dijelaskan Todaro (1981), bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Berdasarkan studi empiris, ada dua jenis ketimpangan pendapatan yang menjadi fokus, yakni ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat dan ketimpangan pendapatan regional. Menurut Taylor (2012), ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat membahas kesenjangan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah (Kuncoro, 2015). Sismosoemarto (2012) mengungkapkan bahwa akibat adanya masalah ini adalah munculnya kecemburuan sosial, ketegangan, dan terus memicu kesenjangan. Sehingga masyarakat mengalami frustrasi sosial yang kemudian berujung pada tindak kriminal atau kekerasan lainnya (Kuncoro, 2015). Adapun ketimpangan pendapatan regional menurut Kuncoro (2004) merupakan ketimpangan perkembangan ekonomi antar berbagai daerah

pada suatu wilayah yang kemudian menyebabkan ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah (Nikijuluw, 2014: 5).

Menurut Syafrizal (2012: 119), ketimpangan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut akan berdampak pada PDRB per kapita yang berbeda antar daerah. PDRB per kapita daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam lebih banyak akan tinggi dan begitupun sebaliknya.

b. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis yang dimaksud meliputi perbedaan pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja masyarakat suatu daerah. Kondisi demografis yang berbeda dapat mendorong ketimpangan antar daerah karena hal tersebut berkaitan dengan produktivitas kerja masyarakat daerah tersebut. Daerah yang memiliki daerah demografis yang baik akan cenderung diikuti dengan produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga akan mendorong peningkatan investasi. Selanjutnya hal itu akan berdampak pada

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan PDRB per kapita daerah tersebut, begitu juga sebaliknya.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang direncanakan pemerintah atau migrasi spontan. Jika mobilitas barang kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak bisa dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Hal ini tersebut juga berlaku pada migrasi, migrasi yang kurang lancar akan berdampak pada kelebihan tenaga kerja di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa tersebut akan menyebabkan ketimpangan karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, akibatnya daerah terbelakang akan kesulitan dalam mendorong kegiatan perekonomiannya. Negara berkembang cenderung memiliki ketimpangan yang tinggi karena kurangnya mobilitas barang dan jasa akibat fasilitas transportasi dan komunikasi yang masih terbatas.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu perbedaan sumber daya alam, fasilitas transportasi (darat, laut, dan udara) dan kondisi demografis. Daerah yang memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi lebih tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sehingga mendorong proses pembangunan

daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah

Daerah yang mendapatkan alokasi lebih besar dari pemerintah akan menarik lebih banyak investasi swasta ke daerah tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat. Kondisi tersebut juga akan menyebabkan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

Alokasi investasi pemerintah ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Indonesia menganut sistem otonomi atau desentralisasi, sehingga dana investasi pemerintah lebih banyak dialokasikan ke daerah, dengan begitu ketimpangan ekonomi antar wilayah akan lebih rendah. Sistem otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Selain itu, setiap daerah juga diberi tambahan alokasi dana dalam bentuk *Block Grant* berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Alokasi Khusus.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan produk nasional (GNP,GDP) karena ada peningkatan kuantitas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (Hudiyanto, 2001). Pertumbuhan

ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Simanjuntak, 1985: 19). Sehingga untuk menilai pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan besarnya nilai GNP/GDP dari berbagai tahun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets dalam (Todaro, 2000) yakni kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang yang tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologis. Dalam definisi tersebut terdapat tiga komponen penting yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. Kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang adalah tanda kematangan ekonomi suatu negara.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan pertumbuhan dalam menyediakan berbagai macam barang.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,

yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor-faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah

menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat akan menurun kembali (Sukirno, 2006).

2.1.2. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari Keynes yang tidak menyinggung masalah ekonomi dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar tetap menambahkan aspek pembentukan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar mengembangkan suatu koefisien yang diturunkan dari suatu rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Koefisien tersebut menghubungkan antara pertumbuhan modal dengan pertumbuhan ekonomi (Adisasmito, 2013: 62-63).

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

Sejalan dengan pengertian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Misalkan diketahui bahwa koefisien ICOR di suatu daerah sebesar 4. Artinya untuk meningkatkan output satu unit diperlukan investasi sebesar 4 unit. Jika diketahui juga output di daerah tersebut pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 8 miliar maka agar output pada tahun yang akan datang tumbuh 10 persen atau bertambah sebesar Rp. 0,2 miliar, dibutuhkan investasi sebesar Rp. 0,8 miliar.

Pada kenyataannya penambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain diluar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi, dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor lain selain investasi diasumsikan konstan.

Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi (Tarigan, 2005): *Pertama*, perekonomian bersifat tertutup dimana hanya terdapat dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. *Kedua*, kecenderungan masyarakat untuk menabung (MPS) besarnya konstan, demikian juga dengan rasio antara modal-output. *Ketiga*, tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut (Tarigan, 2005).

$$g = k = n$$

Dimana: g = growth (tingkat pertumbuhan output)

k = capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Pertumbuhan yang mantap terjadi apabila terdapat keterkaitan antara tabungan (S) dan investasi (I) yang saling menyeimbangkan. Namun, peran k untuk menghasilkan tambahan produksi ditentukan oleh v (*capital ratio output*). Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misal, perekonomian berada dalam kapasitas penuh dengan total pendapatan (Y) = 2.000 triliun rupiah. Hasrat menabung (S) sebesar 20%, karena $I=S$ maka tingkat investasi adalah 20% x 2.000 triliun rupiah = 400 triliun rupiah. Misalkan rasio modal output adalah 5:1 (diperlukan modal Rp.5,00 agar terdapat kenaikan produksi sebesar Rp. 1,00 per tahun) atau produktivitas modal sebesar 0,40. Besarnya kenaikan output adalah $I/v = 400/5 = 80$ triliun rupiah. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi adalah $g = 80 \text{ triliun rupiah} / 2.000 \text{ triliun rupiah} = 4\%$, dengan ketentuan laju pertumbuhan tenaga kerja sebesar 4%.

Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga kerja interregional bersifat menyeimbangkan atau tidak (Tarigan, 2005: 51). Pada model ini arus modal dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya secara seimbang. Namun dalam praktiknya daerah yang pertumbuhannya tinggi (daerah yang

telah maju) akan menarik modal dan tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah dan hal ini membuat pertumbuhan antar daerah menjadi timpang. Artinya daerah yang maju akan semakin maju dan yang terbelakang akan semakin tertinggal. Dengan demikian pertumbuhan antar daerah akan mengarah kepada *heterogenous* (makin timpang) (Tarigan, 2005).

2.2. Hubungan antara PDRB Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan Produk Domestik Bruto perkapita atau pendapatan negara/wilayah dari tahun ketahun tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi (*output*) barang dan jasa (Arsyad, 1994).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dengan membandingkan pendapatan Nasional/Regional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan (Sukirno, 2000).

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan pemecahan masalah pada kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan pengangguran semu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang (Waluyo, 2004).

Bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di tingkat dunia adalah sebagai berikut:

1. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pendapatan per kapita dan semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.
2. Fenomena tersebut terjadi di Asia Tenggara, negara yang sedang berkembang lainnya, Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa Barat.
3. Penyebab ketimpangan karena pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan publik.
4. Simon Kuznets (Hipotesis kurva U terbalik): evolusi distribusi pendapatan dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri). Ketimpangan pendapatan bertambah besar akibat adanya urbanisasi dan industrialisasi.

Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataan membuktikan ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) dalam dekade belakangan ini ternyata berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga di banyak NSB tidak ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Mudrajad Kuncoro, 2006)

3. Teori Investasi

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan hanya daerah-daerah yang dinilai mendapat profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi menurut Mankiw (2006) adalah komponen GDP (*Gross Domestic Product*) yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Ada tiga jenis pengeluaran investasi, yakni sebagai berikut:

- a. Investasi bisnis tetap (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.

- b. Investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang orang beli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan.
- c. Investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi.

Menurut Sultan dan Jamzani (2010) realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpangan antar daerah. Bagaimana yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan. Tidak meratanya tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah disebabkan oleh:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah.
2. Alokasi investasi yang tidak merata.
3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah.
4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) antar wilayah.
5. Perbedaan kondisi geografis antar wilayah.
6. Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Teori Harrod-Domar (dalam Boediono, 1985) adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi suatu makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan dari teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peranan investasi jangka panjang. Dalam

teori Keynes pengeluaran investasi mempengaruhi permintaan penawaran agregat. Harrod-Domar melihat pengaruh investasi dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonomi ini, pengeluaran investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat, tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi.

Dalam teori investasi Harrod-Domar (Arsyad, 1997), pembentukan modal atau investasi merupakan faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui akumulasi tabungan. Menurut Harrod-Domar pembentukan tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat.

3.1. Hubungan antara Investasi dan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dengan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi

dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi.

Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal atau investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat disimpulkan bahwa investasi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan.

4. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk memiliki fungsi ganda dalam perekonomian. Dalam literatur kuno, pada umumnya penduduk dianggap sebagai penghambat pembangunan. Keberadaannya yang dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Artinya, jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Sedangkan dalam literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang-orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Peningkatan

konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 2006).

Menurut Ricardo dalam Jhingan (2004), pertumbuhan penduduk pada suatu saat akan mengakibatkan keadaan yang disebut dengan *stationary state*, yaitu saat dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Selain itu perekonomian akan terus menurun sampai dengan tingkat yang lebih rendah dimana upah buruh sangat minimal, hanya cukup untuk hidup (*subsistence level*). Ricardo melihat pertumbuhan penduduk dan kemerosotan pertumbuhan modal sebagai akibat bekerjanya *The Law of Diminishing Return* sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, teori Neo Klasik menganggap penduduk memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pembangunan, karena:

1. Perkembangannya akan memperluas pasar;
2. Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya dapat menciptakan berbagai akibat yang positif terhadap pembangunan; dan
3. Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam menciptakan pembentukan modal.

Thomas Robert Maltus dalam Todaro (2003), merumuskan sebuah konsep tentang penambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing return*). Maltus menggambarkan suatu kecenderungan universal bahwasanya jumlah populasi disuatu negara akan meningkat sangat cepat pada deret ukur atau tingkat geometrik (pelipat ganda), kecuali jika hal tersebut terjadi disebabkan oleh bencana kelaparan. Pada waktu yang

bersamaan, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmetik.

Oleh karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat terpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit diatas tingkat subsisten (semua penghasilan hanya cukup dikonsumsi sendiri).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jaenudin (2007) dalam penelitian yang berjudul "*Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat Tahun 1997-2005*" dengan menggunakan olah data *Microsoft Excell 2003* dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita daerah-daerah di Jawa Barat mayoritas meningkat pada masa otonomi daerah. Pada masa pra otonomi daerah, Kota Cirebon menjadi kota maju dan berkembang cepat dengan laju PDRB sebesar 1,78% dan PDRB per kapita sebesar 4,8 juta. Sedangkan pada masa otonomi daerah, Kota Bandung dan Kota Sukabumi menjadi kota maju dan berkembang cepat. Ketimpangan pendapatan di antar daerah di Jawa Barat berada pada taraf sedang dengan indeks ketimpangan dibawah 0,35 di tahun 1997 dan 1998. Tetapi, sejak

tahun 1999 indeks terus meningkat dengan peningkatan yang lebih besar dibandingkan penurunan pada tahun 1998 dan 2003. Sehingga dapat dikatakan bahwa indeks ketimpangan di Jawa Barat cenderung meningkat dengan ketimpangan tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 0,680.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kristianingsih (2011) dengan judul “*Analisis Struktur Ekonomi Kota Bandung dengan Menggunakan Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Location Quotient (LQ) dan Shift And Share*” dengan metode *Location Quotient (LQ)* dan *Shift And Share* dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan dominan Kota Bandung dalam konteks perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2007-2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki pertumbuhan yang positif akan tetapi memiliki nilai kontribusi yang negatif. Sehingga jika kegiatan tersebut lebih ditingkatkan kontribusinya maka akan menjadi sektor yang dominal di Kota Bandung.
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewanto, Rujiman, dan Suriadi (2014) dengan judul “*Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Mebidangro*” dengan menggunakan 1) analisis deskriptif; 2) analisis regresi data panel; 3) *Pro Poor Growth Index (PPCI)*. Dan dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Kab. Deli Serdang, dan Kab.Karo) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan

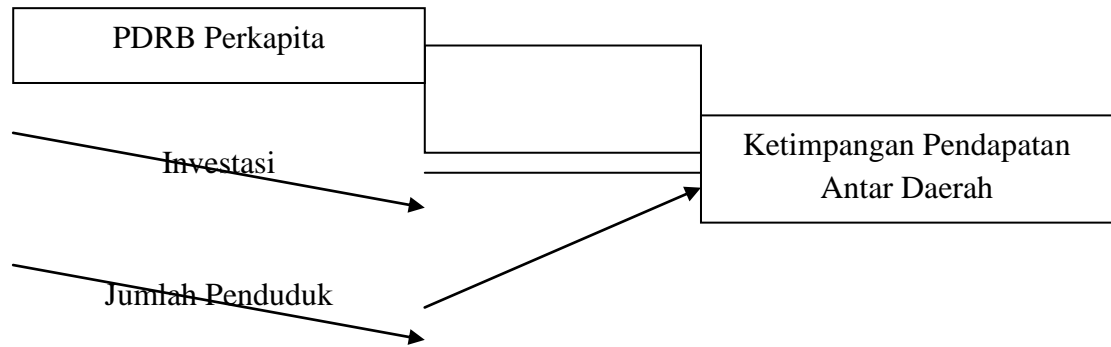
pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan dilihat dari nilai elastisitas netto kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan tetapi ketimpangan pendapatan menjadi penghambat atau mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Mebidangro selama tahun 2004-2011 bersifat tidak pro kemiskinan (*anti poor*) yang ditandai dengan angka indeks *Pro Poor Growth* sebesar -7,824. Sektor-sektor yang berpengaruh dominan dalam pengentasan kemiskinan adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor angkutan dan komunikasi.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yewati (2013) dengan judul "*Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera*" dengan menggunakan model regresi kuadrat terkecil *Ordinary Least Square* (OLS) dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: pengaruh investasi terhadap ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera adalah negatif dengan koefisien regresinya sebesar -0,085. Dan terdapat pengaruh yang signifikan antara aglomerasi dengan ketimpangan ekonomi di wilayah Sumatera adalah positif dengan koefisien regresi sebesar 0,089.
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Setyawan S.E, M.Si dengan judul "*Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Periode 2000-2007*" dengan menggunakan analisis regresi model SPSS 13 dan menghasilkan

kesimpulan sebagai berikut: dari kedua variabel yang dianalisis keduanya berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yaitu variabel Indeks Gini dan Indeks Williamson. Uji f diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,006 dengan nilai f hitungnya sebesar 16,686 dan f tabel 2,78, hal ini berarti bahwa secara keseluruhan variabel independennya mampu menjelaskan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,87 hal ini berarti 87% variasi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah bisa dijelaskan oleh kedua variabel independen, sedangkan sisanya 13% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Dari hasil perhitungan regresi diketahui bahwa Indeks Gini dan Indeks Williamson menunjukkan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu serta pengkajian antara PDRB Perkapita, investasi serta pertumbuhan penduduk dengan ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

Ketimpangan merupakan masalah yang masih sangat sulit untuk dihilangkan di negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan ekonomi terus dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat serta pendapatan per kapita masyarakat juga akan semakin tinggi sehingga dapat mengurangi ketimpangan.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori yang relevan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2009-2015.
2. Investasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2009-2015.
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten tahun 2009-2015.